



# PERKEMBANGAN REFORMASI DI SEKTOR MINERBA

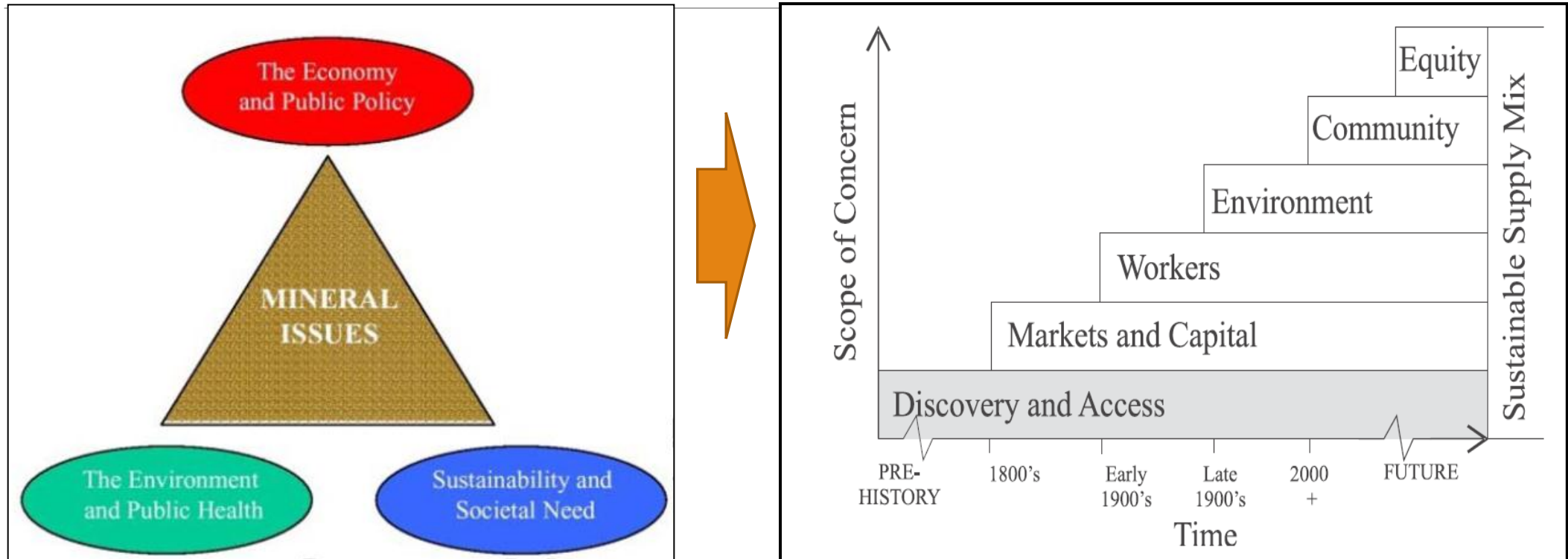
Jumat, 29 Mei 2015

**Bayu Romas, SH**  
Bagian Hukum Ditjen Minerba

## DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

# Pendahuluan

## ISU MINERAL DAN PROSES EVOLUSI SERTA PERHATIANNYA TERHADAP ASPEK KEBERLANJUTAN

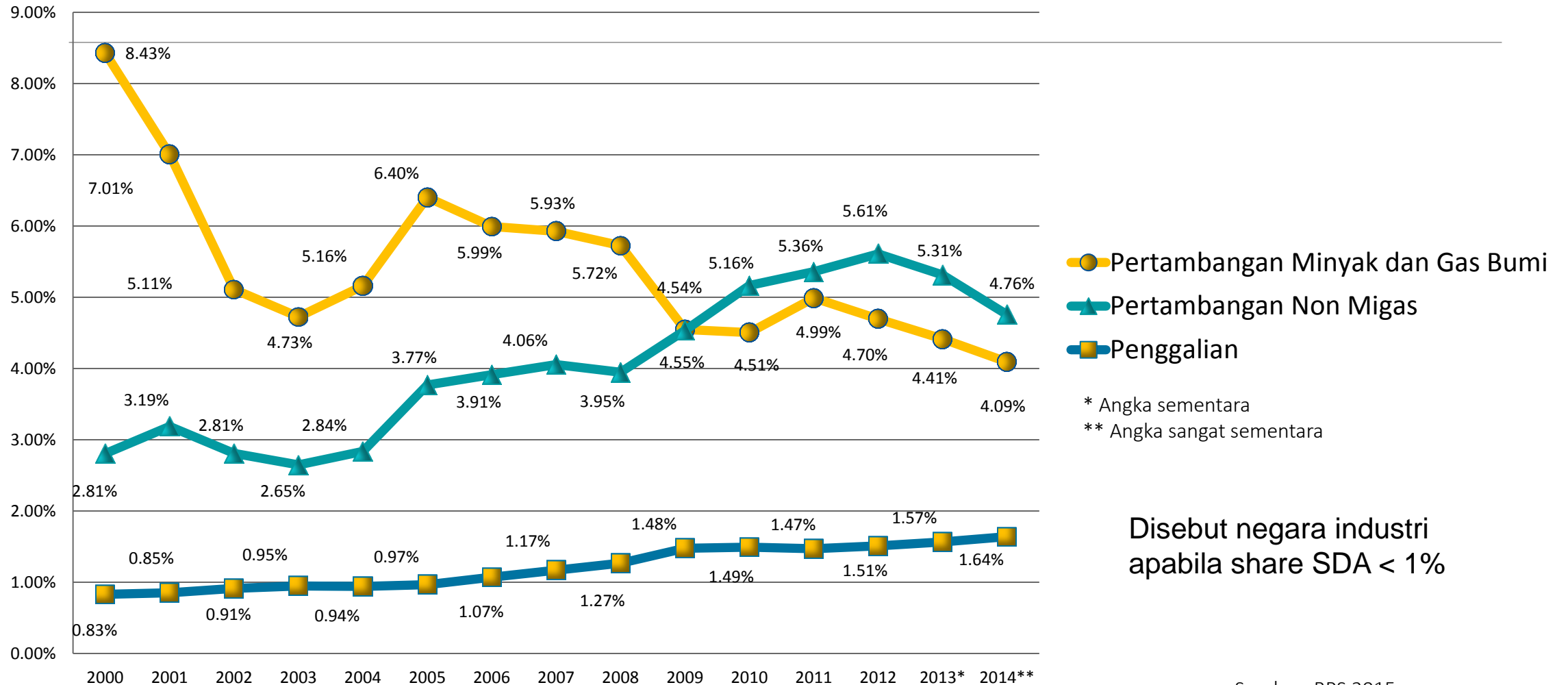


Sumber : Suslick & Machado, 2001; Shields & Solar, 2006)

**“terdapat perubahan besar terhadap pola berpikir tentang pembangunan sektor mineral dan batubara kaitannya dengan aspek keberlanjutan di semua Negara, dan persyaratan keberlanjutan sangat dipengaruhi kecepatan konversi SDA kepada sector produktif lainnya.”**

# Pendahuluan

## Share Pertambangan dan Penggalan Dalam Produk Domestik Bruto

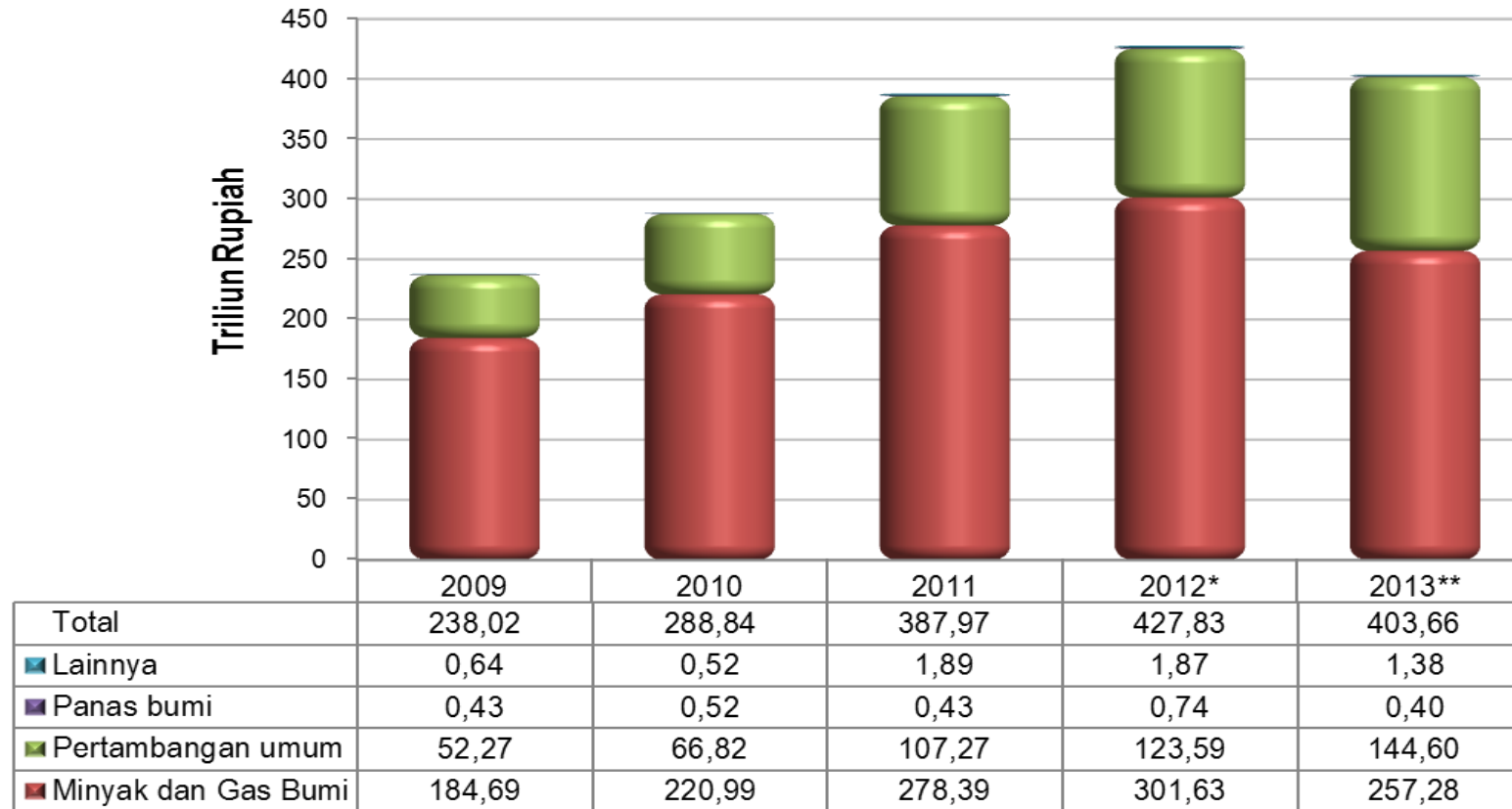


Sumber: BPS 2015

# Pendahuluan

## Penerimaan Migas dan Minerba/Pertambangan Umum (2009 – 2013)

### Penerimaan sektor ESDM



\*) Realisasi

\*\*) Rencana

Penerimaan ini belum termasuk hasil penggalan (batuan dan mineral non logam)

# Peraturan Minerba

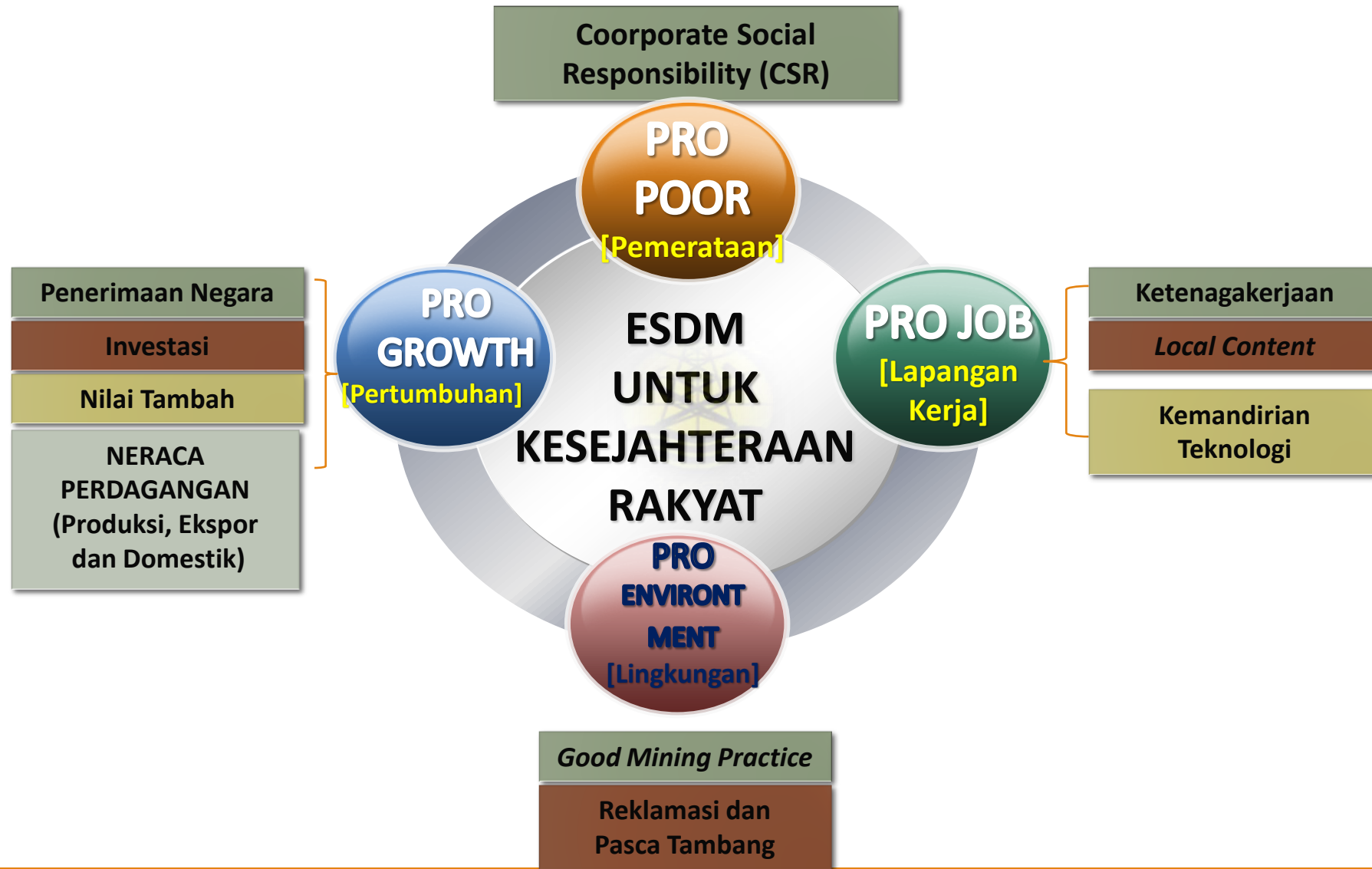
## 1. Asas UU No. 4/2009

---

- Asas UU No. 4/2009 (Pasal2), adalah:
  - a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
  - b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
  - c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
  - d. Keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

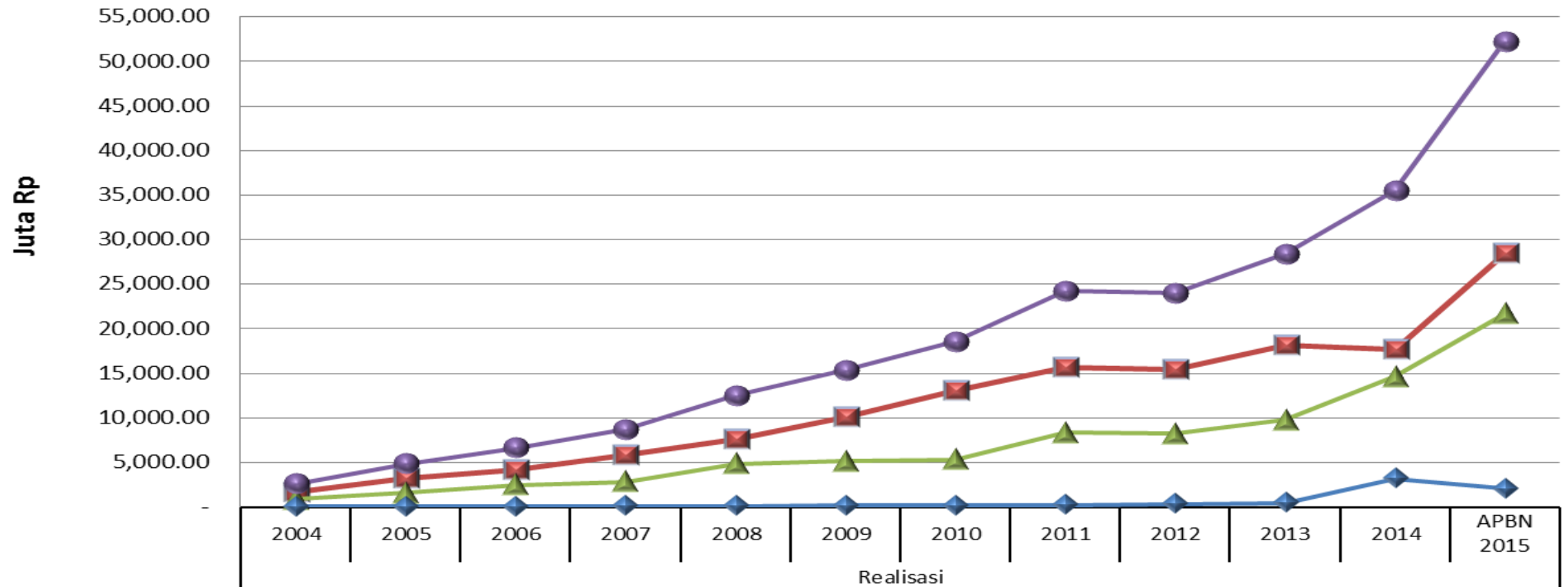
# Peraturan Minerba

## 2. Peran Mineral dan Batubara: Memberikan Manfaat Secara Berkelanjutan



# Peraturan Minerba

## 3. Pendapatan dari Minerba (2004-2015)

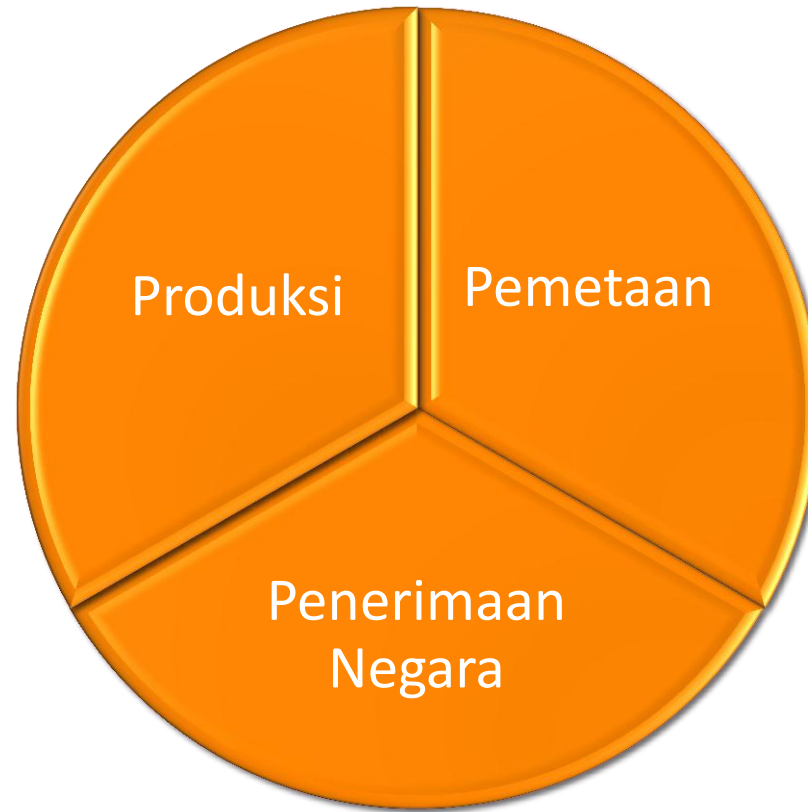


ROYALTI	1,642.17	3,196.03	4,136.99	5,771.82	7,547.64	10,044.80	13,054.95	15,654.69	15,473.23	18,138.37	17,730.49	28,484.80
PENJUALAN HASIL TAMBANG	881.36	1,592.68	2,442.57	2,849.01	4,854.45	5,136.04	5,343.27	8,346.90	8,190.94	9,787.70	14,599.64	21,655.90
IURAN TETAP	50.13	57.10	58.25	76.24	103.06	138.40	161.29	242.94	344.93	465.58	3,157.44	2,071.80
Total	2,573.66	4,845.81	6,637.81	8,697.07	12,505.15	15,319.24	18,559.51	24,244.53	24,009.10	28,391.65	35,487.57	52,212.50

# Peraturan Minerba

## 4. Transparansi di Minerba

---





# Peraturan Minerba

## 5. Penataan IUP

No	Tindak Lanjut	Target Waktu
1.	Diserahkan kepada Gubernur untuk evaluasi administrasi dan Wilayah (PNBP masih dievaluasi Pusat)	Mei-Desember 2014
2.	Koordinasi dan Supervisi bersama KPK-RI di 34 Provinsi dan Kab/Kota :	
	• Monitoring dan evaluasi tindak lanjut koordinasi dan supervisi dengan KPK di 12 Provinsi	6, 20 dan 27 November 2014
	• Monitoring dan Evaluasi dengan KPK atas pelaksanaan penataan IUP di 22 Provinsi	Maret-Juni 2015 (6 lokasi)
3.	Pembentukan Tim Ditjen Minerba untuk Penyelesaian CnC secara paralel ke seluruh provinsi	April-Juni 2015
4.	Batas akhir penyelesaian penataan IUP, disarankan wilayah eks IUP Non CNC ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).	Juni 2015

# Peraturan Minerba

## 5. Penataan IUP (lanjutan)

Per 20 Mei 2015

Status	Sebelum Korsup					Sesudah Korsup				
	Mineral		Batubara		Jumlah	Mineral		Batubara		Jumlah
	EKS	OP	EKS	OP		EKS	OP	EKS	OP	
CNC	1.524	2.056	1.473	988	6.041	1.504	2.211	1.349	1.085	6.149
NON CNC	1.442	1.974	1.063	398	4.877	1.236	1.845	848	350	4.279
Sub Total	2.966	4.030	2.536	1.386	10.918	2.740	4.056	2.197	1.435	10.428
Total	6.996		3.922			6.796		3.632		

# Peraturan Minerba

## 6. Renegosiasi KK dan PKP2B

Uraian	KK	PKP2B
Sepakat sebagian MoU	8	12
Sepakat dan tanda tangan MOU	20	61
Sepakat draf amandemen	5	9 <sup>*)</sup>
Tanda tangan Naskah Amandemen kontrak	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>73<sup>**)</sup></b>

**Catatan :**

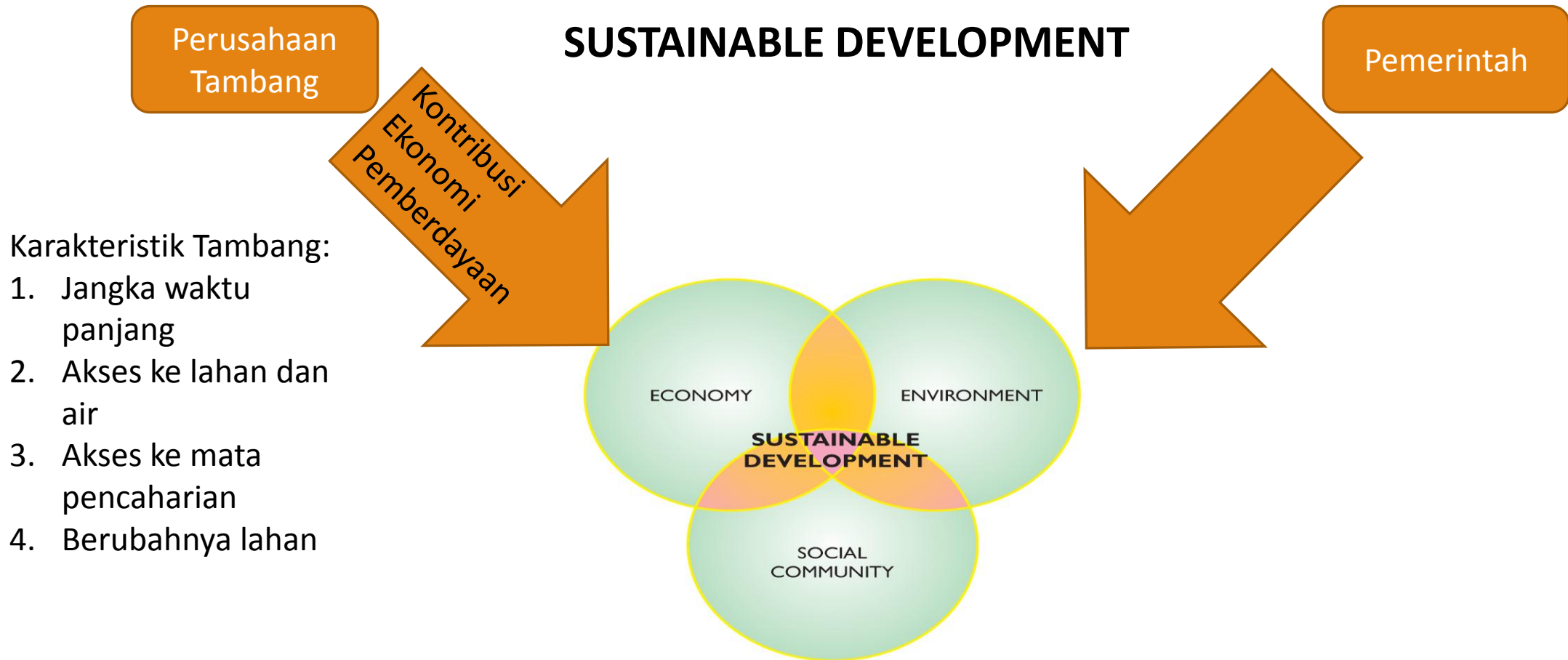
<sup>\*)</sup> Dari 61 PKP2B yang menandatangani MoU terdapat 9 PKP2B yang menyepakati Draft/Konsep Naskah Amandemen,

<sup>\*\*)</sup> Tidak termasuk 2 PKP2B:

- PT Batubara Selaras Sapta (permasalahan internal pemegang saham) dan;
- PT Nusantara Thermal Coal (Terminasi)

# Peraturan Minerba

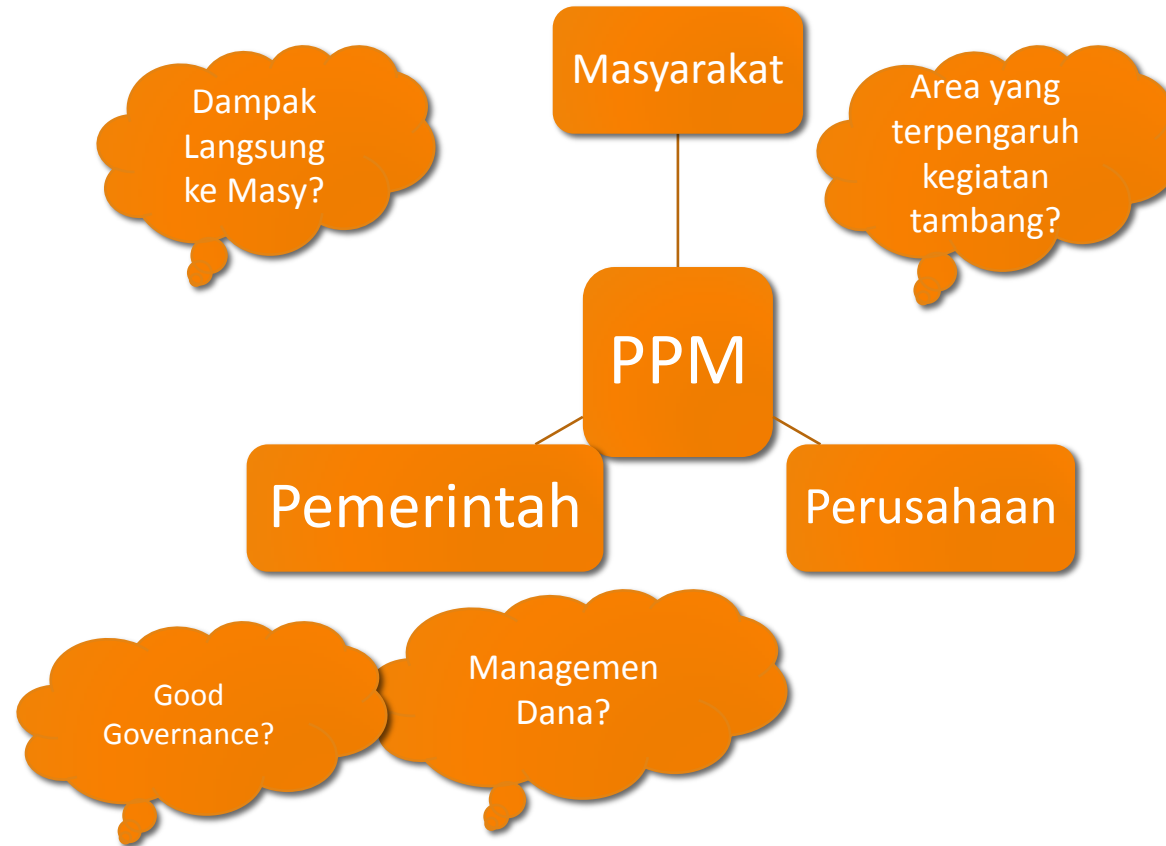
## 7. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat



# Peraturan Minerba

## 7. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (lanjutan)

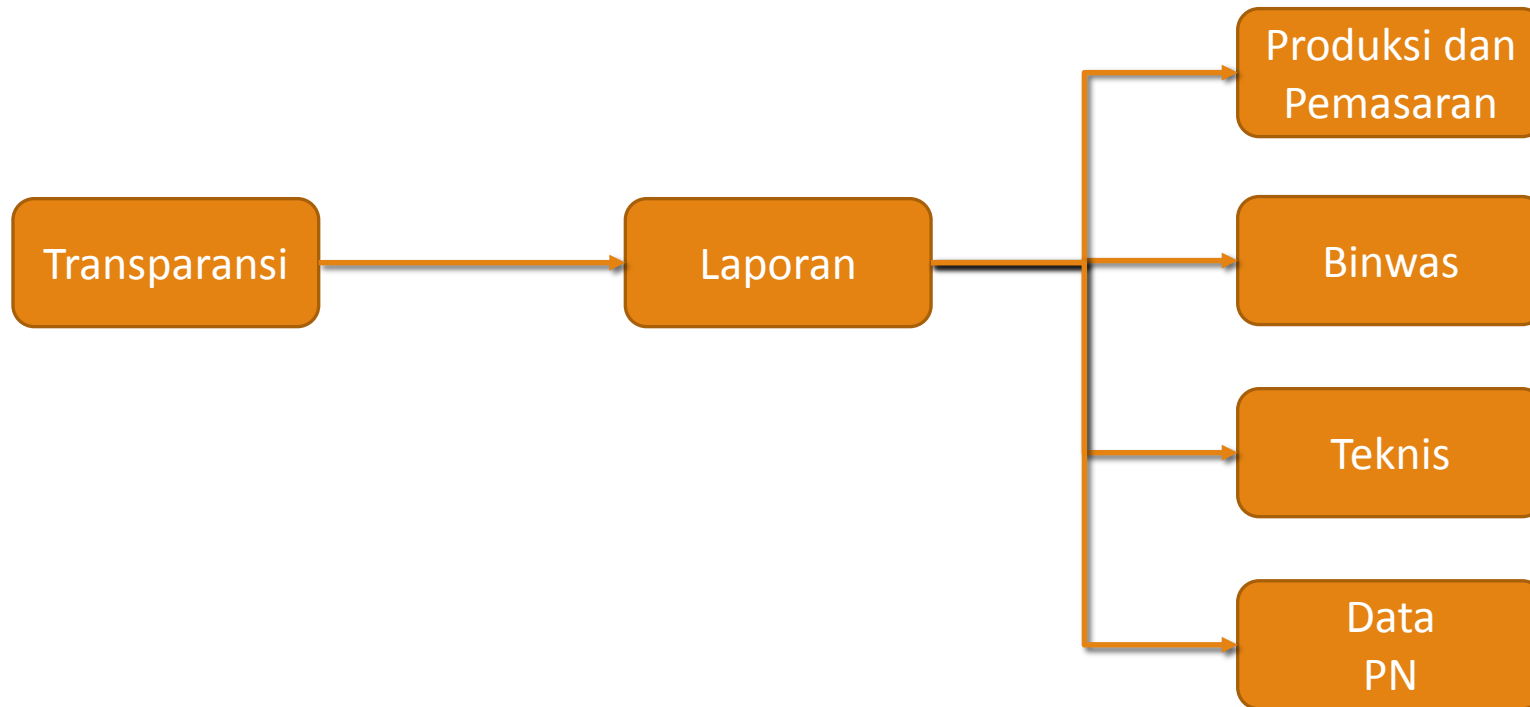
---



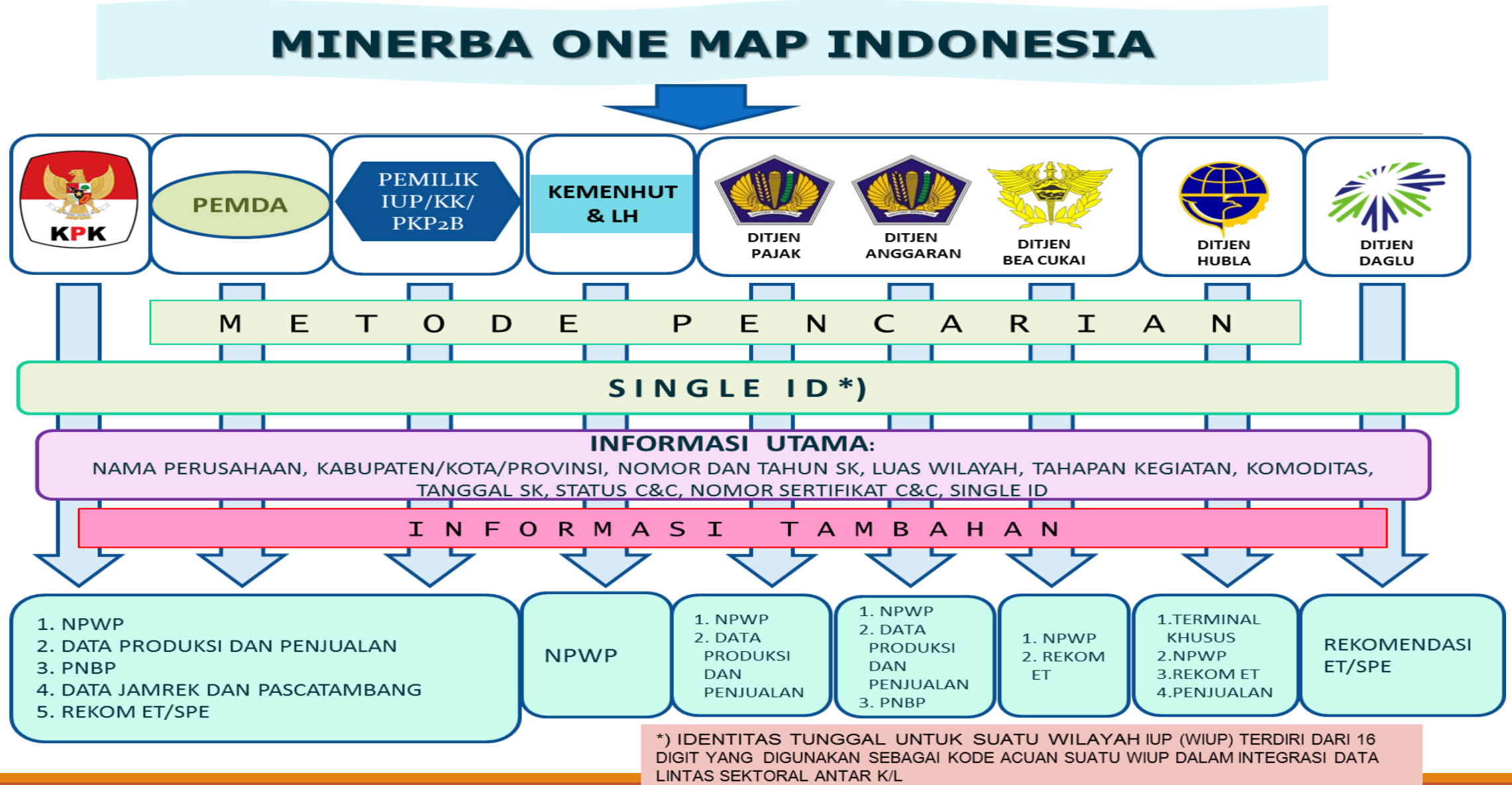
# Peraturan Minerba

## 8. Transparansi Di Sub Sektor Minerba

---



## 9. Minerba One Map Indonesia (MOMI)



Sistem diresmikan pada 22 April 2015, akan menjadi SIG Pemerintah

# Peraturan Minerba

## 10. Tantangan Transparansi

---

- Masih banyak Pemerintah Daerah tidak memberikan pelaporan secara berkala kepada Pemerintah terkait pelaksanaan usaha pertambangan setiap 6 (enam) bulan (Pasal 142 UU 4/2009) → UU No. 23/2014.
- Perusahaan tidak memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah secara berkala (Pasal 111 UU 4/2009).
- Masih banyaknya IUP yang Non-CnC.
- Banyaknya PETI di daerah-daerah.
- PPM yang belum berkelanjutan dan transparan.





Terima Kasih

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)